

Intisari

Persentase penduduk miskin Indonesia telah mencapai satu digit sejak 2018, akan tetapi kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan masih menjadi pekerjaan besar khususnya bagi pemerintah. Peran pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan dalam pengentasan kemiskinan telah lama menjadi pembahasan. Pertumbuhan ekonomi telah dipercaya sejak lama sebagai motor utama pengentasan kemiskinan. Namun, ketimpangan yang sering mengiringi pertumbuhan ekonomi dinilai menjadi penghambat dalam mengatasi kemiskinan. Agar pertumbuhan ekonomi lebih memberikan manfaat bagi orang miskin sekaligus dapat menekan ketimpangan, diperlukan strategi kebijakan yang mengarah pada pertumbuhan inklusif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, yang diukur dengan PDRB per kapita dan pengeluaran per kapita, dan ketimpangan terhadap kemiskinan di Indonesia. Analisis regresi panel model *fixed effects* dilakukan pada data 33 provinsi selama periode 2010-2018 yang terdekomposisi ke dalam wilayah perkotaan, perdesaan, dan agregat keduanya. Pengukuran inklusivitas pertumbuhan ekonomi diobservasi dengan *Growth Incidence Curve (GIC)*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB per kapita tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sementara pengeluaran per kapita memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di semua wilayah. Artinya, kebijakan apapun yang dapat menaikkan pendapatan penduduk akan mampu mengurangi kemiskinan. Kenaikan indeks Gini juga signifikan memperburuk tingkat kemiskinan. Hasil GIC memperlihatkan bahwa tidak ada satu pun wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi inklusif selama 2010-2018. Namun, pertumbuhan selama periode itu terbukti sudah *pro-poor*. Distribusi pendapatan yang lebih merata diperlukan untuk mencapai pengurangan tingkat kemiskinan yang lebih cepat.

Kata kunci: pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, kemiskinan, perkotaan-perdesaan, *fixed effects*, *growth incidence curve*, pertumbuhan inklusif

Abstract

The percentage of Indonesia's poor population has reached a single digit since 2018, but the gap between urban and rural areas is still a big job especially for the government. The role of economic growth and inequality in poverty alleviation has long been discussed. Economic growth has been trusted for a long time as the main motor for poverty alleviation. However, inequality that often accompanies economic growth is considered to be an obstacle in fighting poverty. In order for economic growth to be more beneficial for the poor while at the same time reducing inequality, policy strategies are needed that lead to inclusive growth.

This study aims to determine the effect of economic growth, measured by per capita GRDP and per capita expenditure, and inequality on poverty in Indonesia. The panel analysis of the fixed effects model was carried out on 33 provinces during the 2010-2018 period which were decomposed into urban, rural and aggregate regions. Measurement of economic growth inclusiveness was observed with the Growth Incidence Curve (GIC).

The results showed that per capita GRDP was not proven to have a significant effect on poverty while per capita expenditure had a negative and significant effect on poverty levels in all regions. That is, any policy that can increase the income of the population will be able to reduce poverty. The increase in the Gini index also significantly worsened the poverty rate. The GIC results show that no region has had inclusive growth during 2010-2018. However, growth during that period proved to be pro-poor. Equitable distribution of income is needed to achieve faster poverty reduction.

Keywords: economic growth, inequality, poverty, urban-rural, fixed effects, growth incidence curve, inclusive growth